

Cuplikan Perjuangan Internet Wireless di Indonesia

Onno W. Purbo

LISENSI DOKUMEN

Copyright Onno W. Purbo. **Lisensi Publik.** Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan dan penyebarluasan artikel ini dengan menyebutkan secara lengkap keterangan dokumen ini.

Pada saat tulisan ini anda baca, barangkali Internet menggunakan radio merupakan hal yang wajar-wajar saja bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Tapi anda akan cukup kaget melihat bahwa hal ini akan bertolak belakang sekali dengan kenyataan di luar negeri. Tidak banyak negara di dunia yang mampu untuk mengimplementasi Internet wireless skala besar seperti di Indonesia dengan kecepatan sekitar 2000+ node baru setiap bulan.

Semua ini merupakan hasil sebuah proses panjang mendidik banyak rekan-rekan di Indonesia untuk mampu membuat infrastruktur Internet & telekomunikasinya tanpa banyak di bantu pemerintah, tanpa utangan Bank Dunia, tanpa utangan IMF. Bahkan sialnya lebih banyak di kejar-kejar aparat, polisi dan di ambil peralatannya karena memang kami pada awalnya sebelum tanggal 5 January 2005, sebagian besar dari kami memang mencuri frekuensi tanpa ijin dari pemerintah sama sekali.

Bahu membahu para pejuang Wireless Internet mengadakan workshop-workshop terutama di organize oleh Pak Michael Sunggiardi & rekan-rekan di tahun 2000-an. Kami keliling 30+ kota dalam waktu beberapa bulan dengan di sponsori oleh banyak vendor seperti Corexindo, Compex, Planet dll.

Rekan-rekan APJII di bawah pimpinan Heru Nugroho waktu itu juga cukup aktif, dengan meminjan fasilitas yang ada di PT IDC di bawah pimpinan Ibu Aie & Johar Alam, workshop wireless, VoIP dilakukan.

Proses pemandaian dilakukan dengan banyak cara, baik itu seminar, workshop, demo, juga menulis artikel, buku dan menyimpan berbagai file yang berguna di berbagai situs di Internet agar orang dapat mengambilnya secara gratis misalnya di:

- <http://www.bogor.net/> di sponsori oleh BONET / Pak Michael Sunggiardi
- <http://onno.vlsm.org> di dukung oleh Rahmat Samik Ibrahim (UI)
- <http://sandbox.bellonet.org> di dukung oleh IDRC.

Dengan menyebarnya pengetahuan kebanyakan kalangan di Indonesia, secara perlahan tapi pasti massa pengguna Internet Wireless menjadi berkembang, walaupun kita semua tahu pada saat itu bahwa kita tidak mempunyai ijin menggunakan frekuensi 2.4GHz.

Akhirnya di akhir tahun 2000, keluarlah Keputusan DIRJEN POSTEL 241/2000 tentang penggunaan bersama (sharing) pita frekuensi 2400-2483.5 MHz antara Wireless LAN akses Internet bagi pengguna di luar gedung (outdoor) dan Microwave Link yang di tanda tangani oleh DIRJEN POSTEL **Djamhari** Sirat. KEPDIRJEN ini tampak sudah di draft dari DIRJEN POSTEL sebelumnya Sasmito Dirjo.

Bertumpu pada keputusan DIRJEN POSTEL 241/2000, bulan Februari 2001, Balai Monitoring frekuensi radio di berbagai kota mulai melakukan sweeping terhadap para pembangkang & pejuang Internet Indonesia. Korban pun berjatuhan, beberapa rekan harus merelakan alat-nya di sita oleh oknum Balai Monitoring & Polisi. Memang sebuah perjuangan akan makan korban yang tidak sedikit bagi pelakunya.

Akhirnya pada tanggal 2 Maret 2001, saya melayangkan surat ke DIRJEN POSTEL untuk menarik diri saya dari POSTEL dan tidak akan menginjak kaki ke kantor POSTEL selama teman-teman di sweeping dan urusan regulasi 2.4GHz tidak berpihak pada rakyat Indonesia.

Sampai dengan tanggal 18 Agustus 2005 saya menepati janji saya & tidak menginjak kaki saya ke kantor POSTEL, walaupun tanggal 5 January 2005 saya sudah dapat menginjak kaki ke POSTEL karena akhirnya rakyat Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2.4GHz.

Salinan surat bersejarah tanggal 2 Maret 2001 saya tulis di berikut ini.

Onno W. Purbo (onno@indonet.id)

Jakarta, 2 Maret 2001

Kepada Yth.

Bapak DIRJEN POSTEL

FAX 021- 3860746,3860781, 3844036

Dengan Hormat,

Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya, saya pribadi sangat menghormati & respect kepada pribadi Pak **Djamhari** Sirat. Tetapi dengan amat sangat berat hati, surat ini terpaksa saya layangkan kepada Bapak DIRJEN POSTEL.

Saya setuju bahwa penggunaan frekuensi radio di Indonesia harus menggunakan ijin dari pemerintah. Tetapi terus terang, saya amat sangat kecewa sekali mendengar sweeping yang dilakukan aparat DITJEN POSTEL di frekuensi 2.4GHz. Memang saya bukan ahli hukum, bukan ahli public policy & logika berfikir saya terlalu sederhana, apakah fair? Sweeping & law enforcement dilakukan pada saat regulasi, proses perijinan untuk 2.4GHz belum jelas & belum disepakati oleh semua player? Pada saat orang kesulitan & sering kali di tolak pada saat meminta ijin 2.4GHz dengan diberi alasan oleh aparat POSTEL sendiri bahwa regulasi-nya belum ada. Pada saat beberapa rekan yang memohon ijin sampai sekarang tidak bisa memperoleh ijin, sebagian bahkan terkatung-katung sudah lebih dari satu (1) tahun mendekati dua (2) tahun.

Mohon saya dikoreksi secara tertulis oleh pihak DITJEN POSTEL jika ternyata pernyataan saya salah. Saya akan memohon maaf sebesar-besarnya melalui publik & menarik semua pernyataan saya dibawah ini.

Jika memang benar sweeping di 2.4GHz dilakukan oleh aparat DITJEN POSTEL, maka saya memohon dengan hormat untuk mengundurkan diri dari:

- Team Kelompok Kerja 2.4GHz yang dipimpin oleh Ibu Woro. Sebetulnya sampai detik ini, saya tidak pernah memperoleh pemberitahuan resmi maupun menerima undangan rapat POKJA 2.4GHz.
- Team IT Master Plan POSTEL yang dipimpin oleh Pak Azhar.
- Team-team lain POSTEL kalau nama saya masih tercantum di dalamnya.

Saya terbiasa bekerja dengan azas kepercayaan (trust), rasa aman dan misi untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tampaknya tidak banyak lagi yang bisa diharapkan untuk mencapai misi saya, lebih baik saya mengundurkan diri.

Saya selama ini masih berfikir bahwa DITJEN POSTEL akan mengayomi kami di industri telekomunikasi dan akan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat arogansi penguasa seperti rezim orde baru. Saya selama ini berfikir bahwa DITJEN POSTEL akan dengan senang hati menampung aspirasi masyarakat & memfasilitasi pemberdayaan masyarakat kecil, usaha kecil menengah yang berdarah-darah membangun Internet Indonesia.

Saya pikir DITJEN POSTEL akan sangat mengharamkan terjadinya digital divide yang pada akhirnya pertajaman proses pembodohan bangsa seperti yang dilakukan rezim orde baru dimasa lalu.

Untuk selanjutnya saya berkeberatan untuk menginjakan kaki saya secara fisik ke gedung Sapta Pesona kantor DITJEN POSTEL untuk bertemu dengan aparat DITJEN POSTEL sampai kasus sweeping & regulasi 2.4GHz terselesaikan dan dibuka secara transparan & tertulis ke publik & Internet.

Saya pikir selama ini kita sepakat & melakukan gentlemen agreement untuk mencari jalan keluar terbaik dalam masalah 2.4GHz. Saya pikir DITJEN POSTEL akan dengan senang hati menerima masukan / aspirasi masyarakat dari bawah. Saya pikir kita sepakat membentuk sebuah kelompok kerja yang merupakan hasil beberapa kali pertemuan dengan pihak POSTEL di bulan February 2001 yang lalu. Saya selama ini berfikir bahwa kita sepakat agar proses pembuatan & enforcement public policy POSTEL akan dilakukan transparan, terbuka & juga tertulis di Internet. Saya selama ini berpikir bahwa proses law enforcement hanya fair dilakukan sesudah semua player sepakat atas aturan main bersama-nya & diberikan waktu untuk melakukan pemutihan.

Saya berpikir selama ini kita sepakat untuk secara bersama-sama mencanangkan gerakan nasional telematika & berusaha secara bersama-sama untuk mentransformasikan bangsa ini menuju knowledge based society. Berusaha bersama-sama untuk meningkatkan jumlah pengguna Internet di Indonesia.

Saya pikir selama ini kita saling mengerti bahwa WARNET (yang ternyata tidak terlalu di lirik oleh POSTEL, yang sering di sudutkan dalam berbagai pertemuan di POSTEL) adalah fasilitas akses ke dunia informasi bagi 60-70% bangsa ini. Saya pikir kita mengetahui bahwa WARNET merupakan fasilitas akses Internet paling murah bagi bangsa ini di tengah sulitnya mendapatkan saluran telepon karena kekisruhan terutama di tubuh KSO Telkom. Saya pikir kita mengetahui bahwa peralatan 2.4GHz merupakan alternatif terbaik & termurah bagi tumbuhnya WARNET broadband di Indonesia di tengah impotensi Telkom untuk memberikan akses data broadband berkualitas baik & murah kepada bangsa ini.

Bersama surat ini saya memohon dengan hormat agar pihak DITJEN POSTEL

dapat memberikan penjelasan secara tertulis & terbuka mengenai pelaksanaan sweeping 2.4GHz sampai dengan tanggal 21 Maret 2001 mendatang. Atau saya yang akan membeberkan posisi saya yang tertuang dalam surat ini secara terbuka di wacana publik & Internet.

Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya atas surat & kata-kata yang saya gunakan dalam surat ini. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat menghormati & respect kepada pribadi Pak **Djamhari** Sirat.

Hormat Saya,

Onno W. Purbo

Tembusan:

Sdr. Rudy Rusdiah, Sdr. Abdullah Koro, Sdr. Heru Nugroho, Sdr. Nies Purwanti, Sdr. Zilmy Zamfarra, Sdr. Wawan, Sdr. Aday Wijaya, Sdr. Penjor, Sdr. Didien, Sdri. Judith.

Pertempuran semakin memuncak, pada tanggal 10 November 2001 Asosiasi para pengguna Wireless Intrenet, yang kemudian di kenal dengan sebutan INDOWLI, di bentuk di acara seminar acara seminar & workshop implementasi wireless data network untuk jaringan teknologi informasi di Indonesia dengan sub topic kerangka infrastruktur pembentukan masyarakat berbasis teknologi informasi di Indonesia di Malang, yang di pimpin oleh rekan M. Shalahuddin, yang lebih di kenal sebagai Didin. Pada waktu itu berkumpul banyak rekan, termasuk, Agus Sutandar, Michael Sunggiardi, Barata, Didin, Yohanes Sumaryo dan banyak lagi, kami sepakat membentuk sebuah organisasi untuk menaungi para pengguna wireless Internet di Indonesia.

Perjuangan terus berlanjut, mailing list tempat diskusi secara elektronik menjadi medan perang dan koordinasi sambil menyebarkan ilmu pengetahuan agar rekan-rekan semua dapat belajar satu dengan yang lain. Mailing list yang paling dominan dalam proses perjuangan Internet Wireless di Indonesia adalah indowli@yahogroups.com. Pada saat tulisan ini di tulis di akhir tahun 2005, massa pelanggan mailing list indowli@yahogroups.com termasuk besar dan lebih dari 4000 subscriber.

Tahun 2002, kembali terjadi peningkatan sweeping aparat terhadap rekan-rekan pengguna 2.4GHz, VoIP dll. INDOWLI melayangkan surat protesnya tertanggal 8 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Barata Wardana dan Yohanes Sumaryo. Akhirnya pada tanggal 14 Juni 2002, saya melayangkan surat cinta kepada para pemimpin negeri ini & tentunya tidak di tanggapi karena memang saya hanya rakyat biasa-biasa saja, sehingga suaranya tidak perlu di perhatikan. Salinan ke dua surat saya tuliskan di bawah ini.

Jakarta, 8 Mei 2002

NO: 107/PHB/WLI/IV/2002

Kepada Yth:

Menteri Perhubungan

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta 10110

Perihal : Permohonan Penghentian Penertiban Wirelesslan Frekuensi 2.4 GHz

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keresahan di masyarakat pengguna jasa wireless lan di frekuensi 2.4 Ghz yang disebabkan oleh adanya Surat Pemberitahuan dan Penertiban (Sweeping) yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu:

1. Dinas Perhubungan PEMDA DKI Jakarta. (Surat Dinas Perhubungan PEMDA DKI Jakarta, tertanggal 18 April 2002 NO : 869/ 077. 72)
2. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan RI. (Surat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit kelas I Jakarta, tertanggal 3 Mei 2002, No: 176/SD/B.Mon/V/2002)

Maka kami mohon untuk dapat dihentikan Penertiban Wirelesslan di Frekuensi 2.4Ghz tersebut dengan alasan mekanisme pengaturan dan proses registrasi dan atau perijinan masih sedang dalam pembahasan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dalam hal ini oleh Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi.

WirelessLAN 2.4 GHz ini sudah dipergunakan secara luas untuk keperluan menjembatani kesenjangan digital /memajukan internet di Indonesia pada khususnya dan menciptakan lapangan kerja yang tidak sedikit kepada para pengelolanya serta memberikan alternatif akses Internet dengan biaya yang terjangkau bagi pemakainya.

Tindakan Sweeping serta pelarangan penggunaan wirelesslan frekuensi 2.4 GHz selain akan menghambat proses memajukan bangsa Indonesia melalui Internet, juga akan menghilangkan mata pencaharian bagi pihak yang terkait / menimbulkan pengangguran dan juga menghilangkan alternatif akses Internet dengan biaya yang terjangkau bagi pemakainya.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dan sebagai pertimbangan kami lampirkan copy dari surat tersebut diatas.

Hormat kami,

Barata W. Wardhana
Ketua

Yohanes Sumaryo
Komisi Teknis

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara
4. Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi
5. Direktur Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Pos Dan Telekomunkasi
6. Kepala Kepolisian RI
7. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jaya

8. Gubernur DKI
9. DPR-RI

Jum.at, 14 Juni 2002

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Anggota Dewan

Bapak / Ibu Pimpinan Negara

Dengan Hormat,

Terus terang, saya amat sangat prihatin melihat perkembangan dunia / industri informatika, telematika & telekomunikasi akhir-akhir dibawah kabinet reformasi yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Pemasangan kreatifitas, tindakan represif, pemalakan kepada pelaku usaha & rakyat tampaknya menjadi hal yang wajar & lumrah dan dihalalkan oleh penguasa.

Bersama surat ini, saya atas nama pribadi ingin menuntut beberapa hal yang saya rasa penting untuk kemajuan bangsa Indonesia:

1. Struktur industri yang mendasari UU.36/1999 tidak valid. Kemajuan teknologi, kemudahan operasi alat & murahnya alat telah membaurkan struktur yang ada. Hal ini menyebabkan sulit membedakan Telkom dengan Operator Jaringan, ISP, ITSP, WARTEL, WARNET, RT/RW-net dll. Struktur industri menjadi datar, UU.36/1999 tidak mengakomodasi hal ini & UU.36/1999 harus di tinggalkan.
2. Di bawah ancaman sweeping & tindakan represif aparat, para pelaku IT telah membuktikan bahwa solusi wireless internet pada frekuensi 2.4GHz, 5.2GHz & 5.8GHZ adalah solusi untuk menutup digital divide di Indonesia. Infaq-kan, NOL-kan BHP, unlicensed-kan frekuensi 2.4GHz, 5.2GHz & 5.8GHZ untuk kepentingan rakyat. Negara tidak akan merugi dengan men-zakat-kan <2.5% dari alokasi frekuensi untuk kepentingan bangsa Indonesia.

3. Rendahnya tingkat pendidikan bangsa menyebabkan komunikasi suara menjadi tidak dominan, internet telepon / voip menjadi solusi infrastruktur rakyat yang murah. Kalau boleh saran, buka lebar kompetisi di internet telephony, buang semua pemasangan, KKN yang selama ini terjadi & di halalkan bahkan didukung oleh aparat keamanan dengan mem-BAP-kan beberapa pelaku usaha.

4. Manakah realisasi janji-janji pemerintah membuat kompetisi di industri telekomunikasi? Apakah UU.36/1999 secarik kertas yang tidak bermanfaat?

Sampaikan kapankah rakyat Indonesia harus menderita represi penguasa, sujud & menyembah untuk memperoleh hak-nya yang sudah di jamin oleh TAP MPR XVII/1998 & Amandemen II UUD.45?

Hormat saya

Onno W. Purbo (onno@indo.net.id)

Rakyat Indonesia Biasa

Tembusan:

DPR

Menteri Perhubungan

Menteri Keuangan.

DIRJEN POSTEL

Media Massa & Mailing list InterNet.

Pada tanggal 30 Desember 2003 kembali POSTEL membuat perang urat syaraf dengan menayangkan iklan di media KOMPAS yang berargumentasi bahwa kebijakan mereka memihak pada rakyat Indonesia.

Sayapun naik pitam dan menulis sanggahan yang di terbitkan di media massa Indonesia. Saya salinkan naskah asli dari sanggahan saya kepada POSTEL yang diterbitkan oleh beberapa media massa nasional.

POSTEL Harus Mundur, Rapor Anda Merah Berdarah!!

Onno W. Purbo

Rakyat Indonesia Biasa

Terima kasih Djamhari Sirat CS. Anda telah memberikan hadiah tahun baru paling menyakitkan banyak pejuang Internet grass root di Indonesia. Anda-anda telah membuat rapor anda merah berdarah-darah di mata saya. Sebaiknya POSTEL mundur sajalah karena tidak mampu membangun per-telekomunikasi-an dan Internet bangsa ini.

Strategi penjajah dengan melakukan misleading informasi melalui advetorial berjudul .Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2.4GHz untuk Keperluan Internet. di beberapa media cetak nasional tanggal 30 Desember 2003 dengan mengacu Keputusan DIRJEN No. 241/2000. Sialnya berbasis KEPDIRJEN 241/2000, POSTEL tampaknya menginstruksikan sweeping besar-besaran secara nasional dengan ancaman penyitaan peralatan. Alasan utama tidak ada frekwensi yang tidak berizin termasuk 2,4 GHZ tanpa terkecuali.

Padahal jelas-jelas saat ini sedang dilakukan pembahasan rancangan Keputusan Menteri (KEPMEN) tentang penggunaan frekuensi 2.4GHz untuk keperluan akses wireless LAN internet bagi penggunaan di luar gedung.

Sebagian besar masukan dari luar justru meminta pembebasan frekuensi 2.4GHz & 5GHz bagi penggunaan Internet.

Dengan logika sederhana, artinya, KEPDIRJEN 241/2000 merupakan produk hukum yang gagal dan tidak layak. Eh koq malah dipakai dasar men-sweeping?? Terima kasih POSTEL, anda-anda memang keterlaluan. Terus terang, saya dan banyak teman-teman tidak setuju dengan KEPDIRJEN 241/2000 sejak awal di terbitkan hingga detik ini. Sialnya di klaim oleh advetorial POSTEL merupakan kesepakatan dengan komunitas.

Layaknya penjajah yang arogan, banyak misleading informasi kepada rakyat dilakukan di advetorial .Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2.4GHz untuk Keperluan Internet.. Advetorial mengklaim interferensi wireless LAN internet sulit di atur. Padahal dengan teknik disain jaringan wireless MAN yang bisa di ambil gratis di <http://www.apji.or.id/onno/the-guide/wifi>, interferensi dapat di minimalisasi dengan mudah. Teknik ini bahkan di kuasai oleh banyak pejuang internet grass root di Indonesia, karena mereka memang meminimalkan interferensi yang ada. Memang berbeda dengan solusi POSTEL yang lebih suka melakukan sweeping untuk meminimalkan interferensi.

Advetorial mengklaim bahwa kebijakan tarif biaya gak penggunaan (BHP) frekuensi Rp. 2.7 juta per tahun per Base Transmitter Station (BTS) dan, berlindung di balik peraturan International Telecommunication Union (ITU), memberi kesan bahwa wireless internet tidak mungkin berstatus primer adalah kebijakan yang mendukung peningkatan penetrasi internet di masyarakat. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada dengan di sambi sweeping, hanya mampu meningkatkan pengguna internet wireless sebanyak satu (1) juta pengguna saja.

Hal sangat fatal yang tidak tersurat di Advetorial POSTEL adalah bahwa HANYA Internet Service Provider (ISP) yang dapat memperoleh ijin frekuensi

2.4GHz dan membayar Rp. 2.7 juta / tahun tersebut. Jangan harap sebuah kantor yang ingin menyambungkan beberapa kantor cabang, sekolah yang ingin menyambung antar sekolah seperti di DIKMENJUR (SMK), jaringan antar WARNET, jaringan Internet ke pedesaan seperti di Bali atau jaringan perumahan RT/RW-net akan dapat memperoleh ijin penggunaan frekuensi 2.4GHz tersebut. Padahal pengguna jenis ini mendominasi wireless Internet di Indonesia. Jadi tidak benar klaim POSTEL meningkatkan penetrasi internet.

Sayang POSTEL tak terlalu pandai untuk dapat melihat bahwa justru pembebasan pita ISM 2.4GHz dan 5GHz dari berbagai ijin, lisensi maupun kewajiban pembayaran BHP akan menyebabkan (1) lonjakan pengguna Internet ISM band dari satu (1) juta menjadi 17.8 juta pengguna, (2) kenaikan BHP Jasa Internet dari Rp. 1 Milyard/tahun menjadi Rp. 21 Milyard/Tahun, (3) kenaikan PPh Jasa dari Rp. 7 Milyard/tahun menjadi Rp. 128 Milyard/tahun, (4) masukan PPN dari Investasi peralatan dari Rp. 18 Milyard menjadi Rp. 600 Milyard, (5) lonjakan tambahan kebutuhan komputer dari 50.000 unit menjadi mendekati 2 juta unit, (6) lonjakan tambahan kebutuhan peralatan ISM band dari 5.500 unit menjadi mendekati 130.000 unit dan (7) justifikasi migrasi industri antenna & tower menjadi manufaktur peralatan ISM band senilai US\$4.5 juta dengan nilai komponen US\$650.000 saja. Belum terhitung berbagai efek spin-off di perekonomian Indonesia.

Pengorbanan pemerintah hanya memigrasi existing 2900 microwave link senilai Rp. 626 Milyard yang tercover masukan PPN investasi peralatan yang mendekati Rp. 600 Milyard dan PPh Jasa & BHP Jasa Telekomunikasi. Semua detail perhitungan ada di file impact-ism-unii.xls di bagian file mailing list mastel-anggota, telematika, genetika, indowli di yahoogroups.com. Atau silahkan meminta copy file kepada saya di onno@indo.id.

Saya pribadi (dan saya yakin banyak rekan komunitas) tetap berpendapat bahwa (1) band ISM & UNII (2.4 GHz, 5.2GHz dan 5.8GHz) harus dibebaskan,

(2) pengguna ISM & UNII band tidak perlu lisensi maupun registrasi, (3) mengacu pada Mutual Recognition Agreement (MRA) semua peralatan yang digunakan tidak perlu di approve oleh POSTEL / Pemerintah, jika sudah di approve oleh FCC & ESTI regulator di negara maju, (4) pengguna di batasi daya pancar pada EIRP 30-36 dBm untuk minimalisasi interferensi dengan ancaman pasal 38 Undang Undang 36 Tahun 1999 dan (5) koordinasi penggunaan frekuensi bersama (frequency sharing & reuse) maupun disain Wireless Metropolitan Area Network (MAN) dilakukan secara lokal oleh komunitas.

Terus terang, di World Summit on Information Society (WSIS) Geneve Geneve 9-12 Desember 2003, banyak rekan-rekan negara lain terkagum, terinspirasi pengalaman Indonesia yang real di lapangan, bertumpu swadana & swadaya masyarakat, praktis hampir tidak di danai oleh pemerintah sama sekali. Alhamdulillah, tidak menambah utang negara ke World Bank dan IMF. Bahkan masyarakat melakukan investasi sendiri infrastrukturnya, yang mereka juluki .RebelNet. the Indonesian community based infrastructure.

Teknologi Wireless Internet di 2.4GHz & 5GHz menjadi tulang punggung utama-nya. Teknologi ini demikian mudah dan murah untuk di operasikan menyebabkan kemungkinan penetrasi Internet menjadi sangat mudah. Semua investasi dari rakyat, tanpa campur tangan investor asing; tanpa menaikan tarif Telkom.

Pada World Summit on Information Society (WSIS), Indonesia telah berhasil menunjukan dirinya sebagai salah satu pemimpin dunia pembangunan ICT berbasis masyarakat, yang mampu membangun masyarakat informasi-nya menjadi jutaan orang di tahun 2003 dari nihil di tahun 1993. Indonesia adalah satu-satunya negara, tidak ada negara lain di dunia, yang mampu membangun system dalam skala besar secara swadana & swadaya masyarakat. Tidak heran jika banyak peserta WSIS mengatakan .Indonesia is inspirational!!.

Sayang semua hal yang membanggakan di WSIS harus dilakukan dibawah tindakan represif pemerintah, kejaran aparat, sweeping, penyitaan peralatan, berbagai tuduhan pencurian pulsa oleh Telkom. Barangkali memang nasib kita mempunyai regulator telekomunikasi yang tidak cerdas??

Teman-teman seperjuangan mari lanjutkan terus berjihad & berjuang tegakan keadilan, hancurkan kemaksiatan & kebathilan. Mari kita bangun wireless Internet di semua pelosok, di setiap sekolah, di setiap RT/RW, di setiap rumah. Semoga Allah SWT bersama kita. Amien.

Semua perjuangan merupakan bagian dari proses membuat bangsa ini menjadi lebih baik, tidak ada perjuangan yang tidak membawa korban, minimal korban waktu di para pelakunya. Walaupun banyak juga pengorbanan material yang terjadi, beberapa rekan bahkan berkorban jiwa-nya terutama terjatuh dari tower pada saat menginstalasi peralatan.

Kita sering tidak sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa paling besar di dunia yang telah mengembangkan Internet wireless secara massal. Bangsa lain, terutama Negara berkembang di Afrika & Asia banyak belajar ke bangsa Indonesia.

Walaupun pada saat tulisan ini di tulis, bangsa Indonesia telah menikmati sedikit kemerdekaan dalam menggunakan frekuensi 2.4GHz. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus di kerjakan, terutama, membebaskan frekuensi 5-5.8GHz, membebaskan Internet Telepon, membebaskan RT/RW-net dan masih banyak lagi.

Saya pribadi masih bercita-cita melihat 220.000+ sekolah & 38 juta siswa Indonesia terkait ke Internet. Bukan mustahil pada saat hal ini terjadi, bangsa ini menjadi bangsa besar, lebih besar dari Malaysia & Australia yang hanya memiliki 20+ juta jiwa.

Semoga dengan semakin bebasnya Internet di Indonesia, bangsa ini dapat berkiprah dari kekuatan otak-nya bukan sekedar otot-nya saja. Bahasa keren-nya adalah melihat .Knowledge Based Society. di Indonesia.

Paling tidak cuplikan sejarah ini dapat memberikan nuansa bagi para penerus bangsa Indonesia, bahwa apa yang mereka peroleh merupakan hasil jerih payah banyak pendahulunya. Semoga tidak di sia-siakan & menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar.